

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak umum. Isi pesan dapat berupa informasi, fakta, data, atau elemen lain yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dan tindakan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.¹ Pelaku komunikasi publik bisa berasal dari berbagai latar belakang dan topik yang dibahas pun bisa beragam, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah mencapai kebijakan tertentu. Meskipun siapa pun bisa menjadi pelaku komunikasi publik, akan tetapi dapat lebih ideal jika komunikasi tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam merancang pesan dan berbicara di depan umum (*public speaking*) agar mencapai efektivitas yang optimal.²

Di era modern saat ini, negara-negara menghadapi kondisi di mana ruang publik semakin terbatas, sementara ruang virtual menjadi semakin luas dan tanpa batas. Akan tetapi, permasalahan lain yang muncul menunjukkan bahwa ruang publik berfungsi sebagai tempat untuk interaksi dan pertemuan antarmanusia. Pada ruang publik, orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam pertukaran nilai dan pengalaman. Oleh sebab itu, penyempitan ruang publik berarti mengurangi kesempatan bagi individu untuk berinteraksi, yang pada gilirannya berdampak negatif pada hubungan dan persatuan di antara mereka. Dalam hal ini, komunikasi publik merupakan salah satu aspek

¹ Redi Panuju, *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi* (Prenada Media Group, 2018), 86.

² Achmad Mucharam, "Membangun Komunikasi Publik yang Efektif," *Jurnal Ilmu Komunikasi* XXVII, no. 1 (2022): 74.

yang sangat vital dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

Komunikasi pemerintahan melibatkan penyampaian ide, konsep, dan program-program pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara bertindak sebagai alat komunikasi pemerintah yang bertugas menyebarkan berbagai informasi publik, seperti pengumuman, himbauan, dan regulasi kepada masyarakat. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan upaya transparansi dan kolaborasi melalui publikasi informasi yang relevan, termasuk anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah, secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik juga penting, dapat dilakukan melalui mekanisme seperti pengaduan publik, konsultasi, dan pemantauan kinerja pelayanan publik.³

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, KEMENKOMINFO diberikan tugas, antara lain, untuk menyusun dan menyebarkan narasi tunggal serta data pendukung yang terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Bahkan dalam Inpres tersebut, dijelaskan bahwa informasi harus disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dengan cara yang tepat, cepat, objektif, berkualitas, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti.⁴

Untuk memastikan komunikasi pemerintahan berfungsi dengan baik, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan penting. Pertama, dengan cermat

³ 'DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH', accessed 31 May 2024, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/442/partisipasi_masyarakat_dalam_penyelenggaraan_pemerintahan_daerah_.

⁴ Ahmad Sultra Rustan and Nurhakiki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

memilih bahasa yang sesuai dengan pemahaman komunikan, serta menentukan saluran dan media yang cocok dengan hasil dan dampak yang diharapkan. Langkah kedua adalah berupaya mengatasi atau mengurangi hambatan komunikasi dalam konteks krisis pemerintahan ketiga adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik komunikasi efektif, yang dapat membantu administrator pemerintah dalam pengelolaan yang lebih efisien. Ini termasuk pemahaman tentang audiens (*knowledge about the audience*), pemahaman tentang pesan (*knowledge about the message*), dan pemahaman tentang media (*knowledge about the medium*).⁵

Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai entitas pemerintahan daerah, seperti kabupaten lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalin hubungan yang efektif dengan masyarakatnya. Salah satu upaya yang telah diambil adalah melalui program Ngobrol Persoalan dan Solusi atau yang disingkat "Jum'at Ngopi". Program tersebut merupakan sebuah upaya pemerintah kabupaten Kediri dalam mewujudkan pendekatan kepemimpinan secara bottom-up leadership yang merupakan suatu pandangan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap elemen termasuk masyarakat didorong untuk bekerja secara independent serta berkebasan dalam mengambil keputusan.⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa terdapat adanya praktik pemerintah dalam melakukan komunikasi publik sebagai salah satu upaya membangun ruang publik untuk masyarakat guna dapat turut serta mendistribusikan aspirasi serta evaluasi secara langsung kepada pemerintah, yang difasilitasi melalui

⁵ Ulber Silalahi, 'Komunikasi Pemerintahan : Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik', *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2004), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/652>.

⁶ Pemkab Kediri, 'Data Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri', *Bagianorganisasi.Kedirikab.Go.Id*, n.d., <https://bagianorganisasi.kedirikab.go.id/inovasi>.

program Jum'at Ngopi, yang dimana capaian utamanya adalah kesejahteraan bersama. Dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan fokus penelitian mendalam pada wilayah proses komunikasi dan perencanaan komunikasi pada program “Jum'at Ngopi” serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung pada pelaksanaan komunikasi publik. Sehingga penelitian ini diberi judul **“Komunikasi Publik pada Program Jum'at Ngopi di Pemerintah Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri melalui program “Jum'at Ngopi”?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses komunikasi publik pada program “Jum'at Ngopi” di Kabupaten Kediri.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah pada program “Jum'at Ngopi” di Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada komunikasi publik pada program “Jum'at Ngopi” di Kabupaten Kediri”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari studi ini, terutama bagi peneliti sendiri, dapat digunakan untuk memperluas pemahaman atas teori-teori yang telah dipelajari selama

kuliah. Secara umum, harapannya penelitian ini bisa menjadi panduan atau referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, berharap bahwa penelitian ini akan menjadi dorongan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman secara pribadi. Selain daripada itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengalaman yang berharga bagi kami dalam mengembangkan penelitian di masa mendatang.
- b. Bagi pihak lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan serupa atau berkaitan dengan tema dari penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan dibahas temuan dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi pedoman dalam topik penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah dipilih sesuai dengan tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan penjelasan dan referensi yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih untuk dibahas.

1. Penelitian oleh Felizia Zubair, Retasari, dan Ade Kadarisma berjudul “Strategi Komunikasi Publik dalam Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH” meneliti aktivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas IPB. Penelitian ini fokus pada bagaimana Humas IPB merancang strategi komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa IPB tentang penerapan PTN-BH. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan

pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara komprehensif dengan Kabid Humas IPB dan Ketua BEM, serta observasi studi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik oleh lembaga kampus mengenai urgensi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan menjaga hubungan saling menguntungkan antara mahasiswa dan lembaga kampus. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang sama-sama menganalisis strategi komunikasi publik. Perbedaannya adalah objek penelitian ini berfokus pada proses komunikasi publik oleh pemerintah Kabupaten Kediri melalui program "Jum'at Ngopi".⁷

2. Jurnal penelitian kualitatif oleh Aan Widodo dan Diah ayu Permatasari, yang berjudul "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi dalam Program Bekasi Smart City". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan melibatkan lima informan yang diwawancara secara langsung. hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pemerintah Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi melalui sosialisasi. Program *Smart City* yang diinisiasi oleh Walikota Bekasi sebagai sebuah gagasan atau konsep kota pintar terbukti dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.⁸
3. Jurnal penelitian yang berjudul "Upaya Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang dalam Menyosialisasikan Gerakan Pembangunan Infrastruktur

⁷ Feliza Zubair, Retasari Dewi, and Ade Kadarisman, 'Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH', *Profetik: Jurnal Komunikasi* 11, no. 2 (December 2018): 74, doi:10.14421/pjk.v11i2.1328.

⁸ Aan Widodo and Diah Ayu Permatasari, 'Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City', *E-Journal Unida Gontor* 5 (2020).

Berkelanjutan untuk Masyarakat” yang disusun oleh Aulia Rahman dan Diah Fatma Sjoraida, membahas tentang bagaimana pemerintah daerah memahami perilaku masyarakat dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses sosialisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dan studi kasus dengan melibatkan 9 informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan permasalahan utama di Kabupaten Subang. Pemerintah mencoba untuk menyampaikan program GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan untuk Infrastruktur Berkelanjutan bagi Masyarakat), namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap program ini masih rendah, hanya sekitar 9% dari mereka yang mengetahui program tersebut.⁹

4. Penelitian berjudul “Strategi Komunikasi Publik untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik dalam Menangkal Infodemic Covid-19”, yang berfokus pada upaya meningkatkan kepercayaan publik dalam menangkal infodemic Covid-19 yang ditulis oleh Nisrina Laila Nabila dan Hedi Pudjo Santoso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal, pemberitaan media, dan dokumen pendukung yang relevan. Fokus utamanya adalah pada disinformasi dan berita palsu seputar Covid-19 yang tersebar di media massa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan strategi komunikasi melalui kanal digital, seperti pembuatan timeline komunikasi publik oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Strategi ini

⁹ Aulia Rahman and Diah Fatma Sjoraida, ‘STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MENYOSIALISASIKAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN’, *Jurnal Unpad* 5 (2017).

bertujuan untuk memanfaatkan laman digital pemerintah, termasuk aduankonten.id, yang memungkinkan masyarakat melaporkan konten atau berita bohong yang beredar. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Meski demikian, pemerintah menghadapi kendala dalam komunikasi publik, seperti ketidakakuratan informasi, ketidakjelasan regulasi, dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁰

5. Penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 di Indonesia: Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa dan Agama”. Yang dilakukan oleh Moch Fakhruroji, Betty Tresnawaty, A.S. Haris Sumadiria, dan Enok Rosyidah merupakan sebuah studi kualitatif yang menggunakan metode penelusuran pustaka dengan merujuk pada sumber daya daring. Dalam penelitiannya, mereka membahas perspektif teoritis mengenai strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali strategi komunikasi dari sudut pandang sosiologi komunikasi massa dan agama yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.

Berdasarkan analisis teoritis yang dilakukan, beberapa temuan diperoleh. Pertama, terdapat ketidaksesuaian dalam pemahaman mengenai karakteristik COVID-19 di kalangan pemerintah sendiri, yang mengakibatkan penyebaran informasi yang ambigu. Kedua, kurangnya efektivitas dalam sosialisasi menyebabkan masyarakat memiliki pemahaman yang salah mengenai COVID-

¹⁰ Nisrina Laila Nabila and Hedi Pudjo Santoso, ‘STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM MENANGKAL INFODEMIK COVID- 19’, *Jurnal Komunikasi Universitas Diponegoro* 18 (2020).

19, bahkan sampai pada penolakan terhadap jenazah yang terinfeksi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, meskipun telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masih terdapat aktivitas di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan minimnya upaya pemerintah dalam menangani serta memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan tersebut.¹¹

6. Penelitian oleh Centurion Chandratama Priyatna, F.X Ari Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, dan Anwar Sani. Yang berjudul “Optimalisasi Teknologi Informasi oleh Lembaga Pemerintah dalam Aktivitas Komunikasi Publik”. Penelitian tersebut menerapkan metode campuran, dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga-lembaga pemerintah mengelola sistem informasi dengan optimal menggunakan teknologi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo, yang bertanggung jawab atas teknis pemerintahan, telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital di berbagai perangkat daerah dengan baik.¹²
7. Penelitian oleh Mona Evira Dionty dan Martha Tri Lestari dengan judul “Analisis Proses Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Kereta Api Indonesia Persero dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus. Data utama dikumpulkan melalui observasi

¹¹ Moch Fakhruroji et al., ‘Strategi Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 Di Indonesia : Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa Dan Agama’, *Digital Library UIN SGD Bandung*, 2020.

¹² Centurion Chandratama Priyatna et al., ‘Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik’, *Kajian Komunikasi* 8 (2020).

dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk asisten manajer PT. KAI Persero dan pengguna layanan serta jasa perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. KAI menerapkan strategi komunikasi publik yang meliputi komunikasi tatap muka langsung serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat secara luas untuk meningkatkan penyampaian informasi publik.¹³

Meskipun telah dilakukan berbagai penelitian tentang analisis proses komunikasi publik dalam berbagai konteks, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti topik ini dalam konteks program Jum'at Ngopi di Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, terdapat kekosongan dalam pengetahuan yang perlu diisi untuk memahami secara menyeluruh bagaimana proses komunikasi publik berlangsung pada program “Jum'at Ngopi” di Kabupaten Kediri, termasuk dari segi kebijakan, perencanaan, strategi, dan implementasi operasionalnya.

¹³ Mona Evira Dionty, “Analisis Proses Komunikasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pt. Kereta Api Indonesia Persero Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik,” *repository telkomuniversity* (March 8, 2022), accessed June 24, 2024, <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/178308/analisis-proses-komunikasi-publik-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-ppid-pt-kereta-api-indonesia-persero-dalam-meningkatkan-pelayanan-informasi-publik.html>.